

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. DESKRIPSI KABUPATEN BANTUL

Kabupaten Bantul pada tahun 2016 menjadi kabupaten yang menjadi lulusan terbaik pada program IPS dengan pencapaian kelulusan 100% pada tahun 2015 dan 2016. Kabupaten Bantul juga menuai kesuksesan pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat karena pelaksanaannya yang selalu mengalami peningkatan. nilai rata-rata nya sebagai berikut, pada tahun 2015 menempati peringkat ke 2 dengan tingkat kelulusan, dengan urutan peringkat pertama adalah kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata 64.51, peringkat dua ditempati oleh kabupaten bantul dengan nilai rata-rata 56.46, peringkat tiga kabupaten sleman dengan nilai rata-rata 56.31, dan peringkat ke empat Kabupaten kulon progo dengan nilai rata-rata 54.14, serta peringkat terakhir di tempati oleh kabupaten gunung kidul dengan perolehan nilai rata-rata 53.52.

Pada tahun 2016 kabupaten bantul menempati peringkat ke dua dengan nilai rata-rata 61.00 sedangkan peringkat pertama kota Yogyakarta dengan nilai rata-rata 61.20, peringkat ketiga kabupaten sleman nilai rata-rata 59.97, peringkat ke empat gunung kidul nilai rata-rata 59.96, dan peringkat kelima kabupaten kolon progo nilai rata-rata 57.60 di tingkat SMA dan sederajat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah kabupaten bantul dalam menyelenggarakan ujian nasional

Disamping kesuksesan dalam ujian nasional, tak sedikit pula Kabupaten Bantul menghadapi masalah-masalah seperti kurangnya rasa tanggung jawab peserta tentang seberapa pentingnya belajar menjelang ujian nasional yang berimbas pada penurunan prestasi dari para siswa yang akhirnya berpengaruh terhadap prestasi yang diraih oleh sekolah. Dan kurangnya kesadaran sekolah dalam melaksanakan *try-out* saat menjelang ujian nasional adalah salah satu penyebab kurang berjalannya program yang dibuat oleh pemerintah

Kabupaten Bantul secara maksimal. Namun, hal ini menjadi tantangan dan motivasi pemerintah Kabupaten Bantul dalam menstabilkan serta meningkatkan prestasi dalam dunia pendidikan di D.I.Y.

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu : **Bantulkarang** untuk kawasan selatan, **Denggung** untuk kawasan utara, dan **Kalasan** untuk kawasan timur. Menindak lanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759(Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantu lyang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengku buwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825.Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan *stadsgemente ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia. Dari

Pemerintahan satu Bupati ke Bupati yang lain Bantul terus mengalami perkembangan dan dinamika. Adapun Bupati yang memimpin Kabupaten Bantul yaitu :

- 1) Raden Tumenggung Mangun Negoro 20 Juli 1831
- 2) Raden Tumenggung Jayadiningrat 1845 -1851
- 3) Raden Tumenggung Tirtonegara 1851 -1852
- 4) Raden Tumenggung Nitinegara 1852 -1855
- 5) Raden Tumenggung Danukusuma 1855 -1878
- 6) Raden Tumenggung Djojowinoto 1878 -
- 7) Raden Tumenggung Surjokusumo
- 8) Raden Tumenggung Mangunyudo 1899-1913
- 9) K.R.T. Purbadiningrat 1913 -1918
- 10) K.R.T. Dirdjokusumo 1918 –1943
- 11) K.R.T. Djojodiningrat 1943 –1947
- 12) K.R.T. Tirtadiningrat 1947 -1951
- 13) K.R.T. Purwaningrat 1951 –1955
- 14) K.R.T. Partaningrat 1955-1958
- 15) K.R.T. Wiraningrat 1958
- 16) K.R.T. Setyosudono 1958 –1960
- 17) K.R.T. Sosrodiningrat 1960 –1969
- 18) K.R.T. Prodjohardjono (Pejabat) 1969 –1970
- 19) R. Sutomo Mangkusasmito, SH. 1970 –1980
- 20) Suherman Partosaputro 1980-1985
- 21) K.R.T. Suryo Padmo Hadiningrat (Moerwanto Suprpto) 1986-1991
- 22) K.R.T. Yudadiningrat (Sri Roso Sudarmo) 1991 –1998
- 23) Drs. H. Kismosukirido (PJ) 1998 –1999

- 24) Drs. HM. Idham Samawi 1999 –2004
- 25) Drs. Mujono NA , Desember 2004 - Januari 2005 (ALM) (Penjabat)
- 26) Drs. HM. Idham Samawi 2005 -2010(Terpilih kembali melalui PILKADA langsung 2005)
- 27) Hj. Sri Surya Widati 2010-2015
- 28) Drs. H. Suharsono 2016-2021(Terpilih melalui PILKADA serentak 2016)

2. Slogan Kabupaten Bantul

Slogan Kabupaten Bantul adalah PROJOTAMANSARI yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Produktif-profesional

Artinya bahwa semua potensi yang ada di Kabupaten Bantul baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya bisa berproduksi sehingga mampu membantu mengembangkan potensi daerah, sedangkan profesionalnya lebih ditekankan kepada setiap warganya untuk benar-benar ahli dan matang dalam setiap bidang yang mereka kerjakan, tolk ukur dari profesionalisme ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemerintah, pembangunan daerah, baik sarana maupun prasarananya.

b. Ijo royo-royo

Artinya tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang, perlu diingatkan kepada masyarakat bantul bahwa bagaimanapun bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

c. Tertib

Artinya bahwa setiap warga secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum / perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

d. Aman

Artinya bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

e. Sehat

Artinya bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rokhani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

f. Asri

Artinya bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak harus mewah tetapi lebih cenderung pemanfaatan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

3. Logo Kabupaten Bantul



Gambar 1

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten bantul: 01//1972 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Bantul.

a. Bentuk dan isi lambang

Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah Ellipse (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima. Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan "KABUPATEN BANTUL", di dalam bentuk Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan :

- 1) Keadaan alam dan kekayaan alam
- 2) Latar belakang sejarah
- 3) Semangat dan cita-cita
- 4) Persatuan dan kesatuan
- 5) Ukuran lambang daerah garis tengah horisontal 30 dan garis tengah vertikal

40.

b. Arti dan makna lambang

- 1) Landasan idil pancasila.
- 2) Gambar bintang emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Gambar pohon kelapa menggambar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap.
- 4) Lukisan dalam warna merah, dan warna putih dari roda bergerigi menggambarkan persatuan Indonesia.
- 5) Lukisan dalam gambar sungai menggambarkan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
- 6) Lukisan dalam gambar padi dan kapas menggambarkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
- 7) Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar Ukiran Persegi(linggir Jawa) Empat dan Keris Berlekukn (luk Jawa) Lima.
- 8) Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi "Hamamayu Hayuning Bawono". Nilai-nilai Keagamaan dilukiskan dalam gambar Bintang Emas bersegi lima.
- 9) Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar Keris dan Gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponogoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda. Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.
- 10) Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan

setangkai padi dengan limah puluh butir biji menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 15/1950. Keadaan Alam dilukiskan dalam warna Hijau Muda, gambar Pegunungan, Sungai dan Laut. Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse (bulat panjang) yang merupakan Bunga Teratai berkelopak lima dengan tiada terputus. Pemerintahan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mempunyai 3 (tiga) bidang:

- a) Bidang Legislatif
- b) Bidang Esekutif
- c) Bidang Yudikatif

11) Dilukiskan dalam gambar Pohon Kelapa dengan Tiga Pelelepah dengan "Empat" Butir Buah Kelapa melambangkan bahwa Pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk melakukan :

- a) *Social control*
- b) *Social sport*
- c) *Social participation*
- d) *Social resprocibility*

12) Hasil Produksi Daerah Kabupaten bantul dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi yang menunjukkan adanya pabrik, daun tembakau merupakan bahan eksport dan pohon kelapa yang berbuah menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai hasil spesifik (Geplak) dari Buah Kelapa.

4. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

a. Visi

Visi Kabupaten Bantul adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu: "Bantul PROJOTAMANSARI sejahtera, demokratis, dan agamis."

a. Misi

Adapun misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2011- 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.
- 4) Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

4. Letak Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul mempunyai luas wilayah 506,85 km². Wilayah ini merupakan 15,9% dari luas keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul berada disebelah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan :

- Sebelah selatan: samudra indonesia
- Sebelah utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah timur : Kabupaten Gunung Kidul
- Sebelah barat : Kabupaten Kulon Progo

B. Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dasar Pembentukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Nomor : 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul

1. Visi dan Misi

Visi

“Cerdas, Berakhlak Mulia, Berkarakter Indonesia”

Misi

1. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan yang handal berakhlak mulia dan profesional
2. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program peningkatan mutu pendidikan
3. Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui jalur sekolah dan luar sekolah pada semua jenjang pendidikan seadil - adilnya
4. Mengupayakan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah yang efektif, berdaya saing tinggi

2. Kedudukan

Dinas Pendidikan Dasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dasar;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar;
- d) pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan

- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

4. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas sumberdaya tenaga kependidikan yang profesional
- b) Mewujudkan adanya pengelolaan dana yang efektif efisien, transparan serta memiliki akuntabilitas publik yang tinggi pada setiap lembaga kegiatan
- c) Mewujudkan adanya output pendidikan yang berkualitas yang memiliki akhlak mulia kecerdasan, keunggulan, kemandirian serta kompetitif
- d) Melaksanakan inovasi pembelajaran dengan multi media serta multi metode, menuju terlaksananya sistem pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kreatifitas siswa
- e) Mewujudkan pelayanan prima semua lembaga pendidikan dengan pendekatan kepuasan masyarakat
- f) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta terhadap pembangunan pendidikan dengan perilaku, partisipasi secara proporsional menuju terciptanya paradigma pendidikan.

5. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul mengacu pada 3 (tiga) pilar Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional :

- a) Pemerataan dan perluasan akses
- b) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
- c) Penguatan tata kelola , akuntabilitas dan penciptaan citra publik.

- Terlaksananya manajemen keuangan yang efektif efisien , serta memiliki akuntabilitas publik yang tinggi di semua lembaga pendidikan;
- Terwujudnya output pendidikan yang memiliki akhlak mulia kecerdasan, keunggulan, kemandirian serta kompetitif di pasar global;
- Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- Terlaksananya sistem pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan multimedia serta multi metode, serta inovasi - inovasi baru di bidang pendidikan;
- Terwujudnya pelayanan prima di semua lembaga pendidikan dengan mengutamakan pelayanan masyarakat;
- Terlibatnya swasta serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan pengawasan di bidang pendidikan menuju paradigma baru pendidikan.

6. Kebijakan

- a) Melakukan pengembangan dan pemantapan sistem pendidikan mengacu pada otonomi pendidikan
- b) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta kesejahteraan tenaga pendidikan
- c) Melindungi pemuda dari bahaya destruktif (Napza)
- d) Mempertajam konsep pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan

7. Program

- a) Meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan pelatihan dan kesempatan belajar
- b) Meningkatkan mutu lulusan pendidikan yang memiliki kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik secara seimbang

- c) Efisiensi dan efektifitas penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun dari pemerintah dengan pengelolaan secara transparan dan memiliki akuntabilitas publik yang tinggi
- d) Melaksanakan restrukturisasi dan rasionalisasi untuk mewujudkan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan
- e) Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun unggulan daerah yang berorientasi pada ketrampilan untuk hidup (*life Skill*)
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan kebudayaan serta pembinaan generasi muda dan olah raga melalui school based managemen serta community based education
- g) Mengembangkan kerjasama kemitraan kepada swasta, dunia usaha dan industri, organisasi kemasyarakatan dan lain - lain dalam upaya mewujudkan output pendidikan yang berkualitas

8. Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar, terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan Dan Aset
 - 3. Sub Bagian Program
- 3. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Sarana

4. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas
 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Pengembangan dan Sarana.
5. Bidang Bina Program, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Seksi Pendataan dan Informasi.
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Pelaksanaan Ujian Nasional di Kabupaten Bantul

Ujian Nasional (UN) adalah salah satu agenda tahunan yang wajib di laksanakan di Indonesia yang tujuannya sebagai bahan evaluasi kualitas pendidikan secara nasional. Dalam hal ini, penyelenggaraannya melibatkan beberapa pihak, mulai dari pemerintah, swasta, sekolah dan masyarakat. Sehingga ujian nasional dapat berjalan secara lancar. Salah satu wilayah di Indonesia yang menyelenggarakan ujian nasional adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten ini telah sukses menyelenggarakan UN di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya pada tahun 2015 dan 2016, dimana kesuksesan tersebut dapat dicapai karena pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan setiap tahunnya yang dijadikan bahan acuan kerja untuk tahun berikutnya. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah mengingat persaingan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) cukup tinggi. Seperti halnya pada tahun 2015 secara umum Kabupaten Bantul mendapatkan juara 2 se-D.I.Y, dan pada tahun 2016.

Strategi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya berkordinasi dengan pihak SMA di seluruh kabupaten bantul dalam menjalankan kebijakan terkait persiapan UN. Dalam hal ini pemerintah menggunakan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun sebelumnya untuk merancang kebijakan yang akan di terapkan pada pelaksanaan ujian nasional yang akan datang. Salah satu strategi yang dilaksanakan pemerintah adalah dengan melakukan standarisasi yang di kelompokkan menjadi tiga tingkatan sesuai dengan kemampuan siswanya dimana kelompok pertama yaitu siswa dengan kemampuan diatas rata-rata, kelompok ke dua siswa dengan kemampuan sedang dan kelompok ke tiga siswa dengan kemampuan di bawah rata-rata.

Hal tersebut di benarkan oleh bapak suhirman selaku kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul mengatakan bahwa “ dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemerintah menghimbau kepada setiap kepala sekolah untuk membuat standarisasi kompetensi yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama adalah siswa dengan kemampuan diatas rata-rata, kedua siswa dengan kemampuan sedang dan yang ketiga siswa dengan kemampuan di bawah rata-rata” (Senin, 19 Februari 2018).

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan *try-out* yang di sesuaikan dengan standar kompetensi yang dimiliki di setiap sekolah-sekolah SMA yang ada di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan *try-out* pada tahun 2015 pemerintah melakukan sebanyak satu kali, dalam hal ini pemeritah mendapat hasil yang dirasa masih kurang memuaskan sehingga pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan *try-out* sebanyak dua kali. Pada tahun 2016 inilah pemerintah mendapatkan hasil yang terbilang memuaskan dengan pencapaian kelulusan 100% dan menjadi lulusan terbaik khususnya pada jurusan IPS.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keterlibatan sekolah dan orang tua, dimana pemerintah memberi kewenangan kepada pihak sekolah untuk melakukan analisis terkait sejauh mana kemampuan dan kesiapan dari para siswa dalam menghadapi UN. Selain itu sekolah berkordinasi dengan orang tua siswa untuk memantau para siswa sebagaimana orang tua adalah seseorang yang memiliki kedekatan emosional dan dapat memantau langsung kegiatan siswa di luar sekolah. Karena hal tersebut maka di butuhkan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam mentalitas para siswa dalam menghadapi ujian nasional.